

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah sarana komunikasi antara manajemen dan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, pelanggan, pemasok, karyawan, dan pemerintah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat menggambarkan kinerja perusahaan serta bertanggung jawab atas keadaan perusahaan (Budiyanto & Puspawati, 2020). Pelaporan keuangan juga berperan penting dalam membangun citra positif perusahaan (Nadziliyah & Primasari, 2022).

Laporan keuangan harus memberikan informasi yang tepat dan akurat tanpa adanya tindakan kecurangan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Para pengguna laporan keuangan diharapkan dapat memanfaatkannya secara efektif dalam proses pengambilan keputusan (Octani et al., 2022). Selain itu, laporan keuangan diwajibkan untuk bersifat netral dan tidak memihak pada kepentingan pribadi, serta harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku (Aprilia et al., 2022).

Namun pada realitanya, tidak semua manajemen perusahaan menyadari pentingnya laporan keuangan yang jujur dan bebas dari kecurangan (Lionardi & Suhartono, 2022). Beberapa perusahaan cenderung terlibat dalam tindakan kecurangan dengan maksud agar kinerja perusahaan terlihat optimal di mata para pemangku kepentingan. Salah satu strategi yang digunakan untuk menyembunyikan kondisi kurang menguntungkan adalah dengan menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan realitas sebenarnya (Purnama et al., 2022).

Kecurangan atau tindakan penipuan merujuk pada perilaku yang tidak jujur dengan maksud memperoleh keuntungan yang tidak sah. Dalam konteks laporan keuangan, kecurangan pelaporan keuangan mengacu pada tindakan penipuan yang direncanakan dan dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan menyesatkan pembaca laporan keuangan, terutama investor dan/atau kreditor. Jenis penipuan

semacam ini telah terjadi di sejumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Fraud* adalah tindakan yang disengaja yang melibatkan pelanggaran terhadap beberapa peraturan dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi (Mardianto & Tiono, 2019).

Berdasarkan hasil survei ACFE dari tahun 2019-2022, terlihat adanya kecenderungan penurunan jumlah kasus kecurangan dalam laporan keuangan dalam dua tahun terakhir. Meskipun demikian, data ACFE tahun 2022 menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-4 dari 18 negara di kawasan Asia Pasifik dalam hal jumlah kasus kecurangan laporan keuangan. Pada tahun 2019, terdapat 22 kasus kecurangan laporan keuangan, yang meningkat tajam menjadi 36 kasus pada tahun 2020. Namun, angka tersebut kemudian mengalami penurunan menjadi 29 kasus pada tahun 2021. Di tahun 2022, jumlah kasus kecurangan laporan keuangan kembali mengalami penurunan menjadi 23 kasus.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* terkait dengan berbagai bentuk kecurangan, ditemukan bahwa penyalahgunaan aset merupakan jenis kecurangan yang paling umum, mencapai 86%. Selanjutnya, korupsi menduduki peringkat kedua dengan 50%, sementara penipuan pelaporan keuangan memiliki frekuensi kasus terendah, yaitu 9%. Meskipun demikian, ini menunjukkan bahwa meskipun kasus penipuan pelaporan keuangan memiliki frekuensi rendah, namun memiliki dampak rata-rata kerugian total tertinggi, yakni sebesar \$593.000. Sementara itu, korupsi memiliki dampak rata-rata kerugian sebesar \$150.000, dan penyalahgunaan aset mencapai \$100.000 (ACFE, 2022).

Berdasarkan survei ACFE tahun 2022, organisasi pemerintahan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi korban kecurangan dengan jumlah kerugian terbesar kedua, yaitu sebesar \$138.000. Namun, survei juga menunjukkan bahwa organisasi pemerintahan memiliki persentase terjadinya kecurangan sebesar 18%, menempati posisi ketiga setelah perusahaan publik (25%) dan perusahaan swasta (44%).

Selain itu, survei juga mengungkapkan bahwa 85% dari para pelaku kecurangan yang tertangkap menunjukkan tanda-tanda perilaku mencurigakan dalam melakukan aktivitas penipuan, dan hanya 6% dari mereka memiliki catatan

kejahatan sebelumnya. Hampir setengah dari kasus kecurangan terjadi karena kurangnya kontrol internal atau pengabaian kontrol yang sudah ada (ACFE, 2022).

Penelitian ini menitikberatkan pada isu kecurangan laporan keuangan yang terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN merupakan entitas korporatif yang beroperasi di bawah pengawasan pemerintah, bertujuan untuk menjalankan fungsi pemerintahan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi (Hildayani & Serly, 2021).

Sebagai badan usaha khusus, BUMN fokus pada sektor ekonomi tertentu dengan misi memberikan pelayanan publik, memajukan perekonomian, dan mencapai tujuan nasional. Properti yang dikelola oleh BUMN dianggap sebagai kekayaan negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 48 dan 62/PUUXI/2013. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia seharusnya seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan prinsip ini harus dijunjung tinggi oleh manajemen BUMN. Oleh karena itu, pengawasan ketat oleh regulator diperlukan untuk mencegah potensi kecurangan di lingkungan BUMN (Bpk.go.id, 2014).

Kehadiran praktik kecurangan dalam pelaporan keuangan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentu saja dapat menimbulkan risiko serius terhadap keuangan negara dan mengakibatkan kerugian yang luas, terutama terhadap kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, hal tersebut berpotensi merusak reputasi perusahaan dan citra negara. Meskipun demikian, kenyataannya, masih terdapat kasus-kasus kecurangan di BUMN yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan tindakan kecurangan dalam laporan keuangan BUMN dapat menyebabkan kerugian finansial bagi negara dan merugikan berbagai pihak, terutama kesejahteraan masyarakat, serta dapat merusak integritas perusahaan dan reputasi negara (Hildayani & Serly, 2021).

Salah satu contoh praktik kecurangan yang terjadi di BUMN adalah pada PT. Garuda Indonesia, di mana perusahaan tersebut salah mencatat laba bersih sebesar USD 809.850 ribu pada tahun 2018. PT. Garuda Indonesia mengakui pendapatan dari perjanjian kerja sama dengan PT. Mahata Aero Teknologi sebesar USD

239,94 juta, padahal dana tersebut masih dalam bentuk piutang dan belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan menurut PSAK (Mardeliani et al., 2022).

Isu kecurangan dalam laporan keuangan merupakan permasalahan yang tidak dapat diabaikan, mengingat bahwa tindakan penipuan dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan. Deteksi kecurangan dalam laporan keuangan menjadi sangat penting untuk mencegah potensi kerugian yang timbul akibat praktik kecurangan (Sukmadilaga et al., 2022).

Teori awal yang membahas kecurangan laporan keuangan adalah *Fraud Triangle*, yang pertama kali diusulkan oleh Cressey (1953). Perkembangan selanjutnya mengarah pada teori *Fraud Diamond* yang diperbaiki oleh Wolfe & Hermanson (2004). Kemudian, muncul teori *Fraud Pentagon* yang diajukan oleh Crowe (2011).

Penelitian ini mengadopsi *Fraud Hexagon Model* sebagai kerangka teoritis, karena model ini dianggap sebagai teori kecurangan terkini yang diperkenalkan oleh Vousinas pada tahun 2019. Model ini memiliki komponen yang lebih komprehensif dibandingkan dengan teori kecurangan lainnya, mencakup tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*capability*), arogansi (*ego*), dan kolusi (*collusion*).

Penelitian ini dirancang sebagai respons terhadap inkonsistensi hasil dan keterbatasan yang terlihat dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penggunaan proksi yang bervariasi untuk mengukur *Fraud Hexagon* dalam penelitian-penelitian sebelumnya menjadi motivasi bagi peneliti untuk menggunakan *Fraud Hexagon* dalam penelitian ini, dengan harapan dapat mengidentifikasi proksi yang dapat menjelaskan model yang sedang diinvestigasi secara lebih terperinci. Selain itu, hingga saat ini, penelitian yang menerapkan *Fraud Hexagon*, suatu pengembangan dari konsep *Fraud Triangle*, *Diamond Fraud*, dan *Pentagon Fraud*, dalam konteks pendeteksian kecurangan dalam laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terbatas, meskipun kasus kecurangan keuangan di BUMN masih sering terjadi.

Berdasarkan konteks dan latar belakang fenomena mengenai kecurangan dalam laporan keuangan yang telah dijelaskan di atas, masih terdapat celah penelitian atau *research gap* dari temuan-temuan penelitian sebelumnya, terutama dalam hal penggunaan proksi variabel yang beragam, perbedaan populasi dan sampel, serta keragaman pendekatan penelitian yang diterapkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian ini dengan judul **”Financial Statement Fraud: Dengan Pendekatan Teori *Fraud Hexagon* Pada BUMN Terpilih Tahun 2019 - 2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *tekanan (pressure)* berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang terjadi di BUMN?
2. Apakah *kesempatan (opportunity)* berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang terjadi di BUMN?
3. Apakah *rasionalisasi (rationalization)* berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang terjadi di BUMN?
4. Apakah *kemampuan (capability)* berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang terjadi di BUMN?
5. Apakah *arogansi (ego)* berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang terjadi di BUMN?
6. Apakah *kohusi (collusion)* berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang terjadi di BUMN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *tekanan (pressure)* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang terjadi di BUMN.
2. Untuk mengetahui pengaruh *kesempatan (opportunity)* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang terjadi di BUMN.

3. Untuk mengetahui pengaruh *rasionalisasi (rationalization)* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang terjadi di BUMN.
4. Untuk mengetahui pengaruh *kemampuan (capability)* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang terjadi di BUMN.
5. Untuk mengetahui pengaruh *arogansi (ego)* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang terjadi di BUMN.
6. Untuk mengetahui pengaruh *kolusi (collusion)* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang terjadi di BUMN.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang berguna untuk memperluas wawasan, ilmu pengetahuan, dan menyediakan literatur tambahan yang dapat dijadikan referensi oleh perusahaan atau penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan gambaran tentang metode deteksi kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan dengan menerapkan teori *hexagon fraud*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi para profesional akuntansi, termasuk auditor dan akuntan, untuk mengimplementasikan tindakan pencegahan dan deteksi terhadap kecurangan dalam laporan keuangan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi para pemangku kepentingan agar dapat mengantisipasi kerugian dengan mengidentifikasi kecurangan laporan keuangan sejak dini.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memberikan pemahaman terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangan

melalui penerapan *Hexagon Fraud Model*. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat membantu mengurangi potensi kecurangan dalam BUMN dan juga memberikan wawasan berharga bagi para praktisi, khususnya pengguna laporan keuangan, untuk menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih bijak.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah dan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya dibahas mengenai identifikasi, batasan, dan rumusan masalah. Selain itu, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan juga akan diuraikan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi dasar teori yang menjadi landasan penelitian, kemudian hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang mencakup pengujian dan hasil analisis data serta pembahasan hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran guna membantu penelitian selanjutnya.